



Sejumlah Pabrik Rokok SKT di Jawa Tengah Dibuka, Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun

Semarang, 24 Juli 2024 Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah periode s.d. 31 Mei 2024 yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, bersama Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq, serta *Local Expert* Jawa Tengah Wahyu Widodo.

Sejumlah current issue yang dapat di-highlight yaitu dibukanya sejumlah pabrik rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Jawa Tengah akibat kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2024 yang berdampak terjadinya pergeseran produksi rokok dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi SKT, serta peluncuran program *Crash Program* Keringanan Utang pada Juni 2024 untuk mempercepat penurunan *outstanding* piutang negara dan Berkas Kasus Piutang negara BKNP.

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama akibat dampak tensi geopolitik, kinerja ekonomi domestik masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,97% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,73% (yoy). Kinerja tersebut lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa sebesar 4,84% (yoy), namun masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% (yoy).

Laju inflasi gabungan 9 Kota di Jawa tengah tetap terkendali, pada Juni 2024 terjadi **deflasi -0,28%** (mtm) dan secara tahunan mengalami **inflasi 2,22%**. Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024 sebesar 133,6 (mtm), yang menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik (>100). Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2024 sebesar 113,02 turut menunjukkan akselerasi dibanding bulan sebelumnya, meskipun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,56 turun dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja APBN masih dioptimalkan sebagai *shock absorber* dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Tengah sehingga berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 sebesar 4,39%, penurunan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 10,47%, serta penurunan Rasio Gini pada Maret 2024 sebesar 0,367 yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah semakin berkurang.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN sampai dengan bulan Juni 2024 mencatatkan kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp55,87 triliun (46,65% dari target), sementara realisasi belanja APBN mencapai Rp55,15 triliun (48,74% dari pagu), sehingga terjadi **surplus APBN** sebesar Rp712,86 miliar.

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp26,3 triliun (48,84% dari target) tumbuh 11,13% (yoy) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp26,14 triliun (43,01% dari target) tumbuh 13,86%. Adapun realisasi PNBP mencapai sebesar Rp3,42 triliun (66,7% dari target) tumbuh 4,96% (yoy).

Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp19,46 triliun (43,98% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 17,75% (yoy). Seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Barang sebesar 25,39% (yoy) sedangkan yang terendah belanja Modal sebesar



4,29% (yoy).

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp52,49 triliun (47,01% dari target) tumbuh Rp5,61 triliun atau 11,97% (yoy). Realisasi TKD mencapai Rp35,69 triliun (51,79% dari alokasi pagu) tumbuh Rp3,98 triliun atau 12,56% (yoy). TKD menyumbang 68% terhadap total Pendapatan Daerah. Realisasi belanja APBD sebesar Rp43,73 triliun (37,56% dari pagu) tumbuh 22,29% (yoy). Hingga Juni 2024 masih terdapat surplus Rp8,76 triliun, turun 21,22% (yoy).

Peran Kemenkeu Satu sebagai *Regional Chief Economist* di Jawa Tengah

Melalui PMK No.191 tahun 2022, pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok dengan kenaikan 10% pada 2023 dan 2024. Kenaikan cukai rokok pada tahun 2024 berdampak pada industri rokok dengan terjadinya pergeseran (*shifting*) produksi rokok dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) terutama golongan I menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Hal ini kemudian didukung dengan adanya pembukaan sejumlah pabrik rokok jenis SKT baru yang terdapat di Surakarta, Cilacap, Tegal dan Semarang.

Sesuai dengan sifatnya pabrik rokok SKT yang padat karya, kondisi tersebut membuka peluang kebutuhan tenaga kerja baru yang diharapkan memberi berpengaruh terhadap turunnya angka pengangguran maupun kemiskinan di Jawa Tengah yang pada awal 2024 mencatatkan angka penurunan. Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah melakukan pendampingan pabrik rokok dengan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) baru.

Peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp24,27 triliun (tumbuh 31,59%, yoy) untuk 560.922 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp12,4 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp1,45 triliun dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp62,16 miliar.

Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp471,18 miliar (turun -23,39%, yoy) untuk 103.909 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp215,2 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp37,97 miliar dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp1,54 miliar.

Pemerintah kembali melanjutkan program Keringanan Utang dengan kembali diluncurkan program Crash Program Keringanan Utang pada Juni 2024 oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah untuk mempercepat penurunan outstanding piutang negara dan Berkas Kasus Piutang negara BKPN berdasarkan PMK 30/PMK.06/2024. Target *Crash Program* adalah 56 BKPN dan Nilai Outstanding sebesar Rp2,61 miliar. Adapun yang terealisasi ialah 20 BKPN (35,71%) dan realisasi Pengembalian Piutang Negara sebesar Rp0,92 Miliar.

Kinerja APBN Jawa Tengah pada triwulan I 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN tahun 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dampak perekonomian dan kesinambungan fiskal untuk kesejahteraan di Jawa Tengah.

Narahubung Media:

Iman Widhiyanto Kepala Bidang PPA II,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
DJPb – Mengawal Indonesia,
Indonesia Maju
Telp. 024-515989; 024-3540815

